



Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

**Mulyanah,
Gili Argenti,
Moch Faizal Rizki**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat
mulyanahq1@gmail.com

*Received: 05th February 2021; Revised: 07th March 2021;
Accepted: 08th March 2021;*

ABSTRACT

This research is motivated by the large number of people with disabilities in Bekasi Regency, however the level of empowerment carried out by the Social Service has not been evenly distributed to person with disabilities in Bekasi Regency. This research method uses descriptive qualitative method, with data analysis using Milles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of the skills empowerment program for person with disabilities has not been effective, seen in the Integration variable in the process of implementing the skill empowerment program, there is no socialization carried out either from the Social Service or from the South Tambun District, which has an impact on the lack of information for people variables of Facilities and Infrastructure provide during the process of empowering the skills of facilities and infrastructure, it was Social Service or Tambun District regarding the tools. That given to each group were not used properly and there were some tools. That given by the office of social affairs is lost due to the lack of supervision carried out by the Social Service or Tambun District.

Keywords: Program effectiveness; skills empowerment; Social Service

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, namun tingkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum merata kepada penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan analisa data menggunakan Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektif dilihat pada variabel Integrasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan tidak ada sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial ataupun dari Kecamatan Tambun Selatan, yang berdampak pada kurangnya informasi bagi penyandang disabilitas terkait dengan adanya program pemberdayaan keterampilan. Kemudian pada variabel Sarana dan Prasarana yang diberikan pada saat proses program pemberdayaan keterampilan sarana dan prasarana sudah memadai hanya saja kurang pengawasan baik dari Dinas Sosial atau Kecamatan Tambun terkait dengan alat-alat yang diberikan pada setiap kelompok tidak digunakan dengan baik dan

ada sebagian alat-alat yang diberikan Oleh Dinas Sosial hilang karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ataupun Kecamatan Tambun.

Kata kunci: Efektivitas program; pemberdayaan keterampilan; Dinas Sosial

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas yang hidup di negara-negara berkembang hidup dibawah garis kemiskinan. Penyandang disabilitas juga lebih rentan terhadap kemiskinan disetiap negara, sehingga kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Di negara-negara Asia Tenggara, hampir semua negaranya termasuk Indonesia telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Arie, 2007). Di Indonesia sendiri penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial menurut hasil pendataan pada tahun 2017 atau survey jumlah penyandang disabilitas di beberapa provinsi di Indonesia, sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Sekitar 67,33% penyandang disabilitas dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan utama penyandang disabilitas adalah keterampilan pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang disabilitas tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,900%) dan terendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%). Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) (Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017).

Pemahaman negatif tentang penyandang disabilitas antara lain berakar pada pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal diseluruh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013, p. 618). Pemberdayaan disabilitas dapat dilihat dari perspektif sosial berakar dari sudut pandang mengenai perlunya kemandirian pada penentuan nasib sendiri, menentukan pilihan dan pandangan disabilitas untuk mendorong peniadaan "penindasan sosial" disabilitas (Barnes & Mercer, 2010). Pandangan demikian didasari dari terminologi disabilitas sebagai hambatan dari berbagai konteks untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat (Iudici, Favaretto, & Turchi, 2019).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016). Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas adalah suatu strategi yang didasari oleh seberapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kemampuan. Sebagai salah satu strategi pembangunan, pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang digunakan iuntuk membantu masyarakat dalam menentukan pilihan dalam mengambil keputusan sserta tindakan dalam mengurangi hambatan-hambatan yang ada pada dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuan serta, rasa percaya diri (Safri Sholehuddin, 2020).

Tingkat pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tidak memadai, ketika dihadapkan dengan tuntutan dunia usaha yang kiat kompetitif dari

waktu ke waktu, membawa para penyandang disabilitas menuju kemiskinan. Penyandang disabilitas cenderung tidak diterima bekerja serta sulit untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, permasalahan ini semakin jelas teramati. Selain bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas di negara-negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan para non disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diduga, para penyandang disabilitas biasanya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan (Nurul Syoba, 2018).

Permasalahan seperti itu juga masi dirasakan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Meskipun sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 8 Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa: Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan, Pemerintah Daerah mengupayakan: (a) memberikan kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan inprastruktur dan pelayanan sosial; (b) pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk motivasi, perawatan, pembinaan, kewirausahaan, bimbingan sosial dan bantuan sosial”.

Namun pada kenyataannya, dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi saat ini masi kurang diperhatikan. Hal itu dilihat dari tidak terpasangnya *guiding blocks* saat pembuatan trotoar di Cikarang Utara, sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai kurang ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Padahal *guiding blocks* sangat berguna sebagai alur penentuan dan petunjuk bagi disabilitas khususnya tuna netra. Lebih lanjut Dinas Sosial Kapupaten Bekasi melansir jumlah penyandang disabilitas Tahun 2019 yaitu sebanyak 1,030 orang, hal tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Disabilitas Mental	Disabilitas Fisik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik	Jumlah
155	439	58	378	1,030

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk meringankan beban mereka dalam mencapai kesejahteraanya. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan dan mendorong atau memotivasi penyandang disabilitas agar dapat mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Memberdayakan penyandang disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 2007:1).

Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Tambun Selatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas salah satunya berupa kegiatan pelatihan keterampilan. Kegiatan keterampilan dirasa memang sangat penting dan diperlukan bagi penyandang disabilitas, karena dengan adanya pelatihan keterampilan mereka bisa melatih kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Penyandang disabilitas bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, melainkan bekerja untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam bermasyarakat juga memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas terjun seutuhnya sebagai masyarakat dalam ruang lingkup sosial (Mulyana., G. d. 2019).

Melihat beberapa persolan diatas mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, dilihat dari kurang meratanya pelatihan keterampilan yang diberikan, sehingga masi terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh penyuluhan mengenai pemberdayaan yang lebih efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji “Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode menganalisis data ditunjukkan atau disajikan dengan menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena sosial yang yang terjadi. Menurut Sugiono (2017:15) Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berdasarkan filsafat *post positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai kunci. Dalam penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan konsep efektivitas Dinas Sosial akan menjadi fokus peneliti, dimana konsep tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas yang di kemukakan oleh Richart M. Steers (1985:53) dengan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, Integritas dan adaptasi. Objek penelitian Dinas Sosial di Kabupaten Bekasi. Penentuan informant dalam hal ini ditembuh dengan mencari pihak yang terlibat langsung dalam proses program pemberdayaan keterampilan yakni, Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Staff Penyandang Disabilitas, Staff Kecamatan Tambun Selatan, dan 3 orang penyandang disabilitas. Penentuan informant ditentukan secara purposive berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiono (2017:137) terdapat dua utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Wawancara, Kuesioner, Observasi

dan Studi Pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Richard M. Steers (1985:53). Teori tersebut menggambarkan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk keberhasilan program untuk mengukur dan menganalisa fenomena-fenomena yang menjadi kajian peneliti dengan tiga dimensi yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, sarana dan prasarana. Maka peneliti ini telah melakukan penelitian ke lapangan dan hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan lebih rinci sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bisa dikatakan telah sesuai dengan indikator tercapainya tujuan, hal ini ditunjukkan dengan beberapa poin yang menyatakan bahwa tujuan program ini telah tercapai. Pertama dapat dikatakan efektif karena program pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para penyandang disabilitas. Kedua program pelatihan keterampilan di tunjang dengan dengan fasilitas dan alat-alat yang disediakan oleh Dinas Sosial kabupaten Bekasi seperti alat-alat sablon. Ketiga program ini pelatihan ini dilengkapi sumber daya yang handal seperti pemateri dan tenaga ahli sablon dan menjahit yang didatangkan langsung oleh Dinas Sosial, hal ini sangat menentukan berjalannya program pelatihan ini dengan baik, karena materi dan praktek yang tersampaikan dengan baik akan menghasilkan produk menjahit dan sablon yang baik pula.

Waktu yang di tentukan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tambun Selatan terbilang sangat minim dan sebentar, pemberdayaan program keterampilan hanya dilakukan dalam waktu tiga hari, dimana dalam waktu yang terbilang singkat parapenyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tambun Selatan dituntut harus bisa mengikuti dan memahami program keterampilan yang dilakukan. Pada tahun 2018-2019 Dinas Sosial telah memberikan pelatihan keterampilan berupa pelatihan menjahit dan menyablon bagi penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, proses pemberdayaan keterampilan diberikan secara bertahap, dengan harapan setelah diberikan pelatihan keterampilan tersebut para penyandang disabilitas terus berusaha mengasah kemampuan yang mereka miliki dan mengimplementasikannya. Berikut bentuk pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi dapat di lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Keterampilan bagi penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi

No	Jenis Pelatihan	Tahun Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Menjahit	2018	20 Orang
2.	Pelatihan Sablon	2019	30 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Tercapainya tujuan suatu program merupakan suatu keberhasilan tersendiri karenanya motivasi untuk mencapai hal tersebut sangat penting. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sendiri telah mencapai target itu, karena jika berbicara hasil maka program pelatihan ini telah menghasilkan karya-karya dari tangan para penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara mereka mengakui bahwa program pelatihan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan mereka, serta menjadikan modal untuk mereka bisa berkarya lebih baik lagi. Bagi penyandang disabilitas yang mempunyai niat, mau berusaha dan bersungguh-sungguh akan berhasil seperti salah satu penyandang disabilitas yang telah merasakan manfaat dari diadakannya program pemberdayaan keterampilan melalui proses yang tidak sebentar, kemudian dapat mendirikan usaha konveksi sejak tahun 2016.



Gambar 1.1 Produk hasil pembuatan masker peSnyandang disabilitas
Sumber olahan peneliti tahun 2020

Integritas

Integritas yaitu mengukur terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Sosialisasi program pemberdayaan keterampilan merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai suatu tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Komunikasi Dinas sosial Kabupaten Bekasi dalam upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tentunya tidak hanya dengan aparturnya saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi dengan penyandang disabilitas di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun pada kenyataannya tidak adanya sosialisasi secara langsung yang di lakukan oleh Dinas Sosial ataupun

Kecamatan Tambun terkait dengan program yang ingin dilaksanakan, informasi yang diberikan terkait dengan program pemberdayaan keterampilan hanya dilakukan dengan pertemuan antara ketua penyandang disabilitas kemudian informasi disampaikan di perkumpulan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi.

Adaptasi

Pada indikator adaptasi berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelebaran suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. Berkaitan dengan adaptasi peningkatan kemampuan disini para staff dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan untuk dapat membantu mengefektivkan kinerja staff dalam memberdayakan penyandang disabilitas, namun para staff Dinas Sosial disini tidak mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuannya karena memang yang memberikan keterampilan pada saat proses pemberdayaan baik secara materi ataupun prakteknya Dinas Sosial mendatangkan langsung instruktur yang memang ahli dibidangnya.

Pada indikator sarana dan prasarana sudah memadai dengan didukung oleh anggaran dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan keterampilan Dinas Sosial telah menyediakan mulai dari tempat, alat-alat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, walaupun pemberdayaan butuh jangka waktu panjang tetapi para penyandang disabilitas mampu untuk mengikuti proses pemberdayaan tersebut. Kedepannya mereka yang mengasah kemampuan yang mereka miliki karena Dinas Sosial hanya sebatas memberikan dasarnya saja.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tambun Selatan dapat ditarik kesimpulan: pemberdayaan bagi penyandang disabilitas sudah dikatakan efektif dilihat dari indikator pencapaian tujuan dimana program keterampilan sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, hanya saja program keterampilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi, pada tahun 2018-2019 jumlah peserta hanya terdiri dari 20-30 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan tersebut masih sangat minim dan jauh dari jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi.

Saran yang dapat peneliti berikan pada setiap dimensi Efektivitas Program pemberdayaan yang dikemukakan Richard M. Steers (1985:53) adalah sebagai berikut: Pencapaian tujuan dilihat dari segi kurun waktu bahwa terkait dengan diadakannya sebuah program pemberdayaan dibutuhkan waktu jangka panjang agar program pemberdayaan dapat berjalan efektif. Integrasi dalam menjalankan suatu program agar tercapainya tujuan sangat diperlukan untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, agar para penyandang disabilitas lebih memahami tentang program yang akan dilaksanakan dan mendapatkan informasi yang akurat dari Dinas Sosial langsung terkait adanya program-program yang akan dilaksanakan. Adaptasi terkait dengan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan lagi baik dari segi tempat ataupun alat-alat

yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, serta perlu pengawasan lebih lanjut minimal 3 bulan sekali setelah program telah selesai dilaksanakan agar dapat melihat sejauh mana perkembangan kemampuan yang mereka miliki serta melihat alat-alat yang diberikan untuk pemberdayaan dapat digunakan dengan baik dan tidak disalah gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabet
- Anwar, 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan. Bandung. Alfabeta.
- Streets, M Richard. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga 1985 hal 53
- Syobah, Nurul. Sy. 2018. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 15, No 2 2018 Doi: [http://dx. Doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057](http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057).
- Horsfall. D. & Ollerton. (2013). *Rights to research: utilizing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an inclusive participatory action research tool. Disability & Society, 28 (5), 616-630. Doi: 10.1080/09687599.2012.717881*
- Turchi, G. P &, A., Favaretto, G. (2019). *Community perspective: How volunteers, professionals, families and the general population construct disability: Social, clinical and health implications. Disability and Health Journal, 12(2) 171-179. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2018.11.014>*.
- Geminastiti, Purinami dan Nanang Mulyana. Pemberdayaan Disabilitas dalam dunia kerja. Jurnal Pekerjaan Sosial 1, No. 3 (2019). <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>.
- Safri, Sholehuddin. 2020. *Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Jurnal Prosoding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.24198/ippm.v7i2.29054>*.
- Kartiko, Wahyu. 2019. Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Asia Tenggara. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA 45 Jakarta Vol. 4 No. 2 (September 2019).
- Hayati, Suhailah. 2018. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 6 No. 2 Tahun 2018.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia: www.kemensos.go.id. Hasil Pendataan tahun 2017/survey Jumlah Penyandang Cacat di beberapa Provinsi di Indonesia. Diakses Pada 20 November 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 8 Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 16 ayat 1 dan 2
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.